

MELIHAT MANUSIA INDONESIA DARI ANGKA- ANGKA

11 September 2026

H. Moch. Ali Bin Dachlan

Pada Pemilihan Umum 2009 lalu .Partai Demokrat memperoleh 148 anggota DPR atau sekitar 21,4% dari semua suara yang masuk. Sebelumnya pada Pemilu 2004, Partai Demokrat hanya memperoleh suara 58 kursi parlemen saja. Demikian pula setelah SBY tidak sebagai presiden suara partai itu terjun bebas.

Pada Pemilu 2014 PDI memperoleh 109 suara anggota parlemen dan pada Pemilu 2019 suara PDI melonjak menjadi 128 suara parlemen. Artinya jika sebuah Partai sedang berkuasa ,jumlah suara yang diperoleh akan semakin besar. Tentu saja kita masih menunggu data setelah orang PDI tidak lagi sebagai presiden.

Pada Pemilu 1955, Partai Nasional Indonesia(PNI) yang dimiliki Soekarno, memperoleh suara 23,33 % sebagai pemenang nomor wahid lalu disusul oleh Masyumi. Dana pada lima Pemilu dibawah Presiden Soeharto .Golkar meraih suara di atas 61 % suara. Melihat perkembangan angka angka tersebut di atas, kemungkinan besar Gerindra juga akan memasuki jaman keemasannya pada Pemilu 2029 nanti, dan akan meraup suara terbesar dalam Pemilu nanti. Dan akhirnya Partai itu akan berkuasa selama dua priode seperti yang dialami oleh SBY Demokrat dan Jokowi PDI P.

Mengapa ? Karena partai -partai di Indonesia, selain partai yang berkuasa, tidak mempunyai kuasa untuk meraih kuasa. Akibatnya, partai- partai politik mengembangkan apa yang disebut "mental asal dapat" atau menurut sesenggak Sasak,"timbang dacin araan coat" atau dari pada tidak dapat (jabatan), lebih baik dukung yang kuat.

Cara berfikir seperti ini akan banyak melahirkan para penjilat, para jongos dan istilah turunan yang lainnya. Semakin besar jumlah orang Indonesia seperti sifat tersebut di atas, sebenarnya bangsa tersebut sedang mengalami kebangkrutan sebagai bangsa yang bermartabat, atau kebangkrutan manusia yang berakal sehat, atau sedang memasuki masa krisis kebudayaan.

Namun demikian, masih tersisa angka 18-20 % suara rakyat Indonesia yang melihat Pemilu secara sinis dan tak mau terlibat dalam angka -angka pemilih tersebut, lalu membiarkan saja suaranya disimpan didalam pikirannya (Golput). Angka ini juga sebagai perbandingan dari 100 % suara, hanya tersisa 20% saja yang masih memilih jalannya sendiri, menepi dari hiruk pikuknya para penjiat dan para jongos yang sedang berpesta pora.

Jika kita setuju gunakan angka- angka tersebut sebagai penentu arah kualitas sebuah bangsa, untuk sementara kita seharusnya bersedih hati, karena keadaan tersebut sebagai gejala semakin menipisnya nilai kejujuran, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kemandirian dan kerja keras yang mengalami kemerosotan atau sama dengan bangsa yang sedang terjerumus ke arah kehidupan bangsa yang tidak memiliki arah jelas.

Menemukan Arah

Salah satu kelemahan bangsa Indonesia adalah “semua mau maju di atas panggung partai politik.” Padahal isi dari ideologi masyarakat Indonesia dapat diturunkan menjadi hanya 2 yaitu religious, dan nasionalis. Memang menurut Clifford Geertz dalam bukunya *The Religion of Java* 1960 menurunkan tiga model manusia jawa yaitu abangan, santri dan priyayi. Abangan bercirikan kejawen kental, islam KTP, masih percayanya roh-roh gaib, selamatan dan dukun. Sedangkan santri dicirikan sebagai islam puritan, taat syariat dan rajin ke Masjid. Sedangkan priyayi diambil dari sisi elite birokrat, ningrat, etika halus dan mempunyai garis keturunan yang kuat.

Sedangkan di sini penulis lebih setuju jika priyayi ini segmen kelas social daripada dilekatkan karakteristik ideologis padanya. Bagaimana pun juga priyayi yang dicirikan sebagai kaum elit, birokrat, bangsawan dan seterusnya dapat masuk kedua sisi ideologis terdahulu yaitu islam puritan atau islam abangan. Oleh karenanya penulis hendak mendasarkan pembagian manusia Indonesia hanya dicirikan oleh dua ideologi keagamaan yaitu religious dan nasionalis.

Religious ditempati oleh orang-orang yang dicirikan dengan ketaatan terhadap agama. Sedangkan abangan dapat dicirikan atau digolongkan pada ideologi nasionalis. Kendati pun

masyarakat Indonesia terdiri dari banyak agama, namun demikian mereka dapat memilih di antara dua pencirian yaitu taat beragama atau nasionalis.

Dengan adanya dua pencirian terdahulu ada menjadi parameter penulis untuk dapat lebih mudah mengarahkan Indonesia hendak mau dibawa ke mana. Dalam konteks ini dalam perpolitikan nasional mestinya bisa menjadi hanya dua partai politik. Dengan hanya dua partai politik maka pengarusutamaan Indonesia menjadi bangsa dan Negara yang relatif stabil akan dapat dengan lebih mudah dicapai.

Mengapa perlu ada penyederhanaan partai? Para pembaca harus tahu bahwa demokrasi liberal yaitu demokrasi tanpa batas seperti saat ini membuat Indonesia sulit menjadi Negara yang stabil. Isinya hanya kebisingan terus –menerus. Lihat saja bagaimana 28 tahun berjalan sejak Soeharto sebagai rejim yang diidentifikasi sebagai rejim otoriter lalu dihadapkannya rejim demokratis. Apa yang terjadi adalah demokrasi tiada arah, demokrasi liberal yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia.

Saksikanlah bagaimana pemilu telah mendatangkan berbagai pasangan presiden/wakil presiden. Bahkan di sepuluh tahun terakhir Indonesia berjalan dalam pemerintahan yang kontroversial. Buktinya 10-an tahun berjalan ada presiden yang sampai hari ini masih diributkan ijazahnya. Jangan ditanya maslah korupsi, kolusi dan nepotisme, pada eranya semua sangat subur. Diiringi pula lemahnya berbagai lini penegakan hukum, penyalahgunaan kekuasaan juga banyak terjadi. Sampai kapan Indonesia terombang-ambing dalam lautan demokrasi liberal yang dicirikan oleh kebebasan masyarakat dalam kehidupan kebangsaannya, namun tidak banyak memberi manfaat bagi arah pemerintahan yang berpihak kepada kesejahteraan dan keadilan masyarakat dalam pengertian sejati.

Jikalau mau lebih kritis ada buku berjudul Demokrasi Impor Amerika Paling Mematikan. Dari buku ini dapat dilihat siapa yang paling diuntungkan dari keberadaan Indonesia saat ini yang terus terombang –ambing dalam pusaran demokrasi tanpa pelabuhan. Jikalau USA sering menjadi rujukan banyak bangsa dan Negara kenapa Indonesia tidak mengambil contoh dalam kehidupan partai politiknya? Aneh, ketika sebuah bangsa seperti Indonesia sangat

membanggakan USA sebagai Negara hegemon, bahkan berkiblat padanya, tetapi giliran hendak merujuk pada kehidupan partai politiknya Indonesia tidak mau peduli.

Dengan posisi sebagai Negara demokrasi liberal di mana partai-partai dapat ditumbuhkan setiap saat, dapat ditinggalkan dan loncat-loncat setiap saat dan seterusnya. Justru membuat bangsa ini tidak serius dalam membangun karakteristik demokrasi yang mapan. Lebih suka “dipermainkan” dari pada memainkan model politik yang stabil dan terkendali. Bagaimana mungkin mau stabil dan terkendali jikalau partai-partai terus bermunculan dan saling “memakan” .

Sekali lagi kiblat kehidupan social-politik dan budaya banyak berkiblat ke USA. Bahkan banyak kaum terdidik pandai bangsa Indonesia alumni Universitas-universitas terkemuka di USA. Dalam pada itu kenapa tidak mau belajar mengenai kehidupan partai politiknya yang hanya terdiri dari dua partai? Apalagi USA dan Indonesia sama-sama presidensil. Bisa jadi karena USA presidensil lalu mengambil bentuk dua partai. Nah kenapa Indonesia yang sistemnya presidensil tetapi seolah-olah tidak mau mengikuti USA dengan dua partainya?

Sejarah Reformasi

Selama 32 tahun Indonesia di bawah kepemimpinan militer yaitu pemerintahan HM. Soeharto. Dalam masa itu bangsa Indonesia merasa tertekan, karena semua serba militeristik. Suara –suara kebebasan menjadi sangat mahal karena bisa-bisa berakhir dengan tuduhan subversif lalu di hilangkan atau dipenjara. Ketika kemudian waktu melumpuhkan rejim Soeharto maka kemunculan anitesa dari belenggu selama 32 tahun pun menemukan momentnya.

Dalam pada itulah partai politik menjadi sangat banyak. Seolah hendak menegaskan keinginan bangsa Indonesia untuk lepas bebas dari aturan rejim militeristik dengan hanya diperas menjadi 3 partai pada kepemimpinan Soeharto. Namun demikian setelah 28 tahun berjalan ternyata reformasi tidak juga memberi bentuk kemajuan berarti terhadap kemajuan bangsa Indonesia.

Parameternya sederhana saja, misalnya kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi seakan tiada berakhir, bahkan semakin merata dipraktikkan setelah orde reformasi. Kasus-kasus korupsi tiada berkesudahan dan melilit banyak pejabat mulai dari pejabat desa sampai pejabat elit Negara.

Parameter yang mudah dilihat juga adalah lemahnya penegakan hukum. Seiring kasus-kasus korupsi yang marak, sejalan dengan itu penegakan hukum juga masih lemah. Masih ada kesan tebang pilih. Masih ada posisi tawar orang-orang yang terlibat kasus korupsi untuk mendapatkan hukuman yang ringan, sehingga tidak membuat efek jera.

Dari dua parameter terdahulu dan tentunya masih banyak parameter lainnya, Indonesia setelah reformasi bukannya maju-melaju, namun sepertinya masih jalan ditempat. Semua memang dikatakan demokratis, tetapi demokrasinya masih sebatas di atas kertas.

Oleh karena itu penulis mengambil garis tegas bahwa reformasi sejak 28 tahun sepertinya ada yang salah. Apa itu? Kegagalan partai-partai melahirkan kader-kader terbaik bagi membangun bangsa dan Negara. Proses perekrutan kader partai tidak melalui proses yang cermat, melainkan hanya sebatas jual beli kepentingan. Di sinilah titik pangkal dari kerusakan bangsa saat ini, sehingga kasus-kasus korupsi tidak juga berakhir.

Disebabkan kental nuansa transaksionalnya, maka seakan-akan partai-partai berlomba untuk lahir. Tugasnya bukan untuk membangun kehidupan social-politik yang sehat, malah hanya menjadi kendaraan yang hanya dipakai ketika pemilu hendak dilangsungkan. Tidak ada nilai-nilai luhur yang ada adalah mampu tidak para kontestan membayar mahar dipartai-partaipengusung.

Pada saat yang sama partai-partai juga meloloskan para politisi hanya berdasarkan kemampuan finansial dan popularitas. Isi otak dan kapasitas nomer sekian. Itulah kenapa kemudian kehidupan social politik bangsa Indonesia menjadi ramai tetapi tidak produktif dalam pengertian positif. Para politisi tidak ada yang mendorong transformasi ke arah kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang lebih baik.

Hanya berisikan kebisingan retorika. Lihat saja bagaimana absensinya para anggota dewan di senayan ketika rakyat bersuara menolak MBG. Alih-alih para dewan perwakilan rakyat bersuara mengkritisi executive justru yang terjadi adalah mereka diam atau menjadi jebak executive.

Sudah lama dewan perwakilan rakyat membiarkan masyarakat Indonesia berjuang sendiri, karena mereka sudah merasa membayar untuk menjadi anggota dewan, sehingga tidak ada urgensinya untuk membela atau menyampaikan aspirasi masyarakat. Kemana rakyat harus mengadu jika ini sudah terjadi. Oleh sebab itulah di samping partai-partai harus di rampingkan,

masyarakat juga harus segera menyadari kekeliruannya agar tidak terus menerus menjadi obyek di setiap kontestasi pemilu.

Masyarakat tidak boleh lagi hanyut dalam permainan partai dan para politisi. Hanya dengan mahar lima puluh ribu atau seratus ribu atau sembako, lalu masyarakat berbondong-bondong memberikan suaranya. Tugas penyadaran ini memang memerlukan waktu, namun seiring semakin seringnya masyarakat terabaikan, tentu diharapkan dapat menjadi pembelajaran politik.

Di sisi lain sudah saatnya dicarikan cara bagaimana agar partai-partai yang terus bereproduksi dirampingkan saja. Dengan begitu nantinya orang-orang yang masuk ke dalam dua atau tiga partai itu didorong berdasarkan kapasitas dan isi otak. Bukan isi tas dan bukan sekedar karena mempunyai popularitas.

Hanya dengan demikian akan ada harapan keberfungsian kehidupan demokrasi di Indonesia. Jangan harap apa-apa bilamana hal ini belum bisa terlaksana. Bagaimana pun mereka menjadi politisi dan pejabat karena mereka sudah mengeluarkan banyak biaya. Gilirannya setelah mereka duduk dikursi mereka hanya berfikir bagaimana mau mengembalikan dan mendapatkan laba bersih dari biaya yang sudah dikeluarkan.